

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN KETAHANAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA**

DI BKKBN KOTA MAKASSAR

Yang Disusun Dan Diajukan Oleh:

AKBAR SUMITRO

No. Pokok : E12115507

Telah diperhankan di hadapan Tim Penguji

Pada tanggal 28 Januari 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si.

Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si

NIP.19570818 198403 1002

NIP.19680411 200012 1001

Mengetahui

Ketua Departemen

Ketua Program Studi

Politik dan Pemerintahan

Ilmu Pemerintahan

Il. Sukri S.IP, M.si.

Dr. Hj. Nurlinah, M.si.

9750818 200801 1 008

NIP . 19630921198702 2 001



Optimization Software:
www.balesio.com

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN KETAHANAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA DI BKKBN KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk mencapai derajat Sarjana S-1**

Program Studi Ilmu Pemerintahan



OLEH

AKBAR SUMITRO

E 121 15 507

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
JURUSAN ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2019



LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN KETAHANAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA**

DI BKKBN KOTA MAKASSAR

Yang Disusun Dan Diajukan Oleh:

AKBAR SUMITRO

No. Pokok : E12115507

Telah diperhankan di hadapan Tim Penguji

Padatanggal 28 Januari 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si. Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si

NIP.19570818 198403 1002

NIP.19680411 200012 1001

Mengetahui

Ketua Departemen

Ketua Program Studi

Ilmu Politik dan Pemerintahan

Ilmu Pemerintahan



ukri S.IP, M.si.

50818 200801 1 008

Dr. Hj. Nurlinah, M.si.

NIP . 19630921198702 2 001

LEMBAR PENERIMAAN

SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN KETAHANAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGADI BKKBN KOTA MAKASSAR**

Dipersiapkandandisusunoleh

AKBAR SUMITRO

E12115507

Telahdidiperbaikidandinyatakantelahmemenuhisyaratolehpanitiaujianskripsipada
program
StudillmuPemerintahanFakultasIlmuSosialdanIlmuPolitikUniversitasHasanuddin

Makassar,PadahariSenin 28 Januari 2019

Menyutujui,

PANITIAN UJIAN

Ketua : Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si. ()

Sekretaris : Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si. ()

Anggota : Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si. ()

Anggota : Dr. A. Lukman, M.Si. ()

Anggota : A. Murfi, Sos. M.Si. ()

Pembimbing I : Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si. ()

: Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si. ()



Assalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh

BismilahiRahmaniRohimPujidansyukurBerkat**ALLAH SWT**DenganRahmat Dan Hidayah-Nyalahsehinggapenulisdapatmenyelesaikanskripsiini yang mengambiljudul”
ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI BKKBN KOTA MAKASSAR”

TujuanpenuliskripsiiniuntukmemenuhisebahagianyaratmemperolehgelarSarjana (S.IP) bagimahasiswa program S-1 di program studi ILMU PEMERINTAHAN JurusanIlmu SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HASANUDDIN Makassar.

Penulismenyadaribahwaskripsiinimasihjauhdarikesempurnaan,

olehsebabitupenulismengharapankritikdan saran yang bersifatmembangundarisemuapihak demi

kesempurnaanSkripsiIni,Terselesaikanyaskripsiinitidakterlepasdaribantuanbanyakpihak, sehingpadakeempataninidengansegalakerendahanhatidanpenuh rasa

hormatpenulismenghaturkanterimakasih yang sebesar-besarnyabagisemuapihak yang telahmemberikanbantuanmorilmaupunmaterilbaiklangsungmaupuntidaklangsungdalam penyusunanskripsiinihinggaselesai, terutamakepada yang sayahormati:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A. selakuRektorUniversitasHasanuddinbesertajajarannya yang telahmemberikankesempatankepadapenulisuntukmenyelesaikanstudi Strata Satu (S1).

2. BapakProf Dr Armin ArsyadM.SiselakuDekan FISIP UNHAS stafnyaatasbantuandankerjasamanya.

BapakDr.Phil.SukriS.IP,M.Si.

sanIlmuPolitikdanIlmuPemerintahanFisipUnhas.



4. Ibu Dr. Hj. Nurlinah, M.Siselakuketua Prodi IlmuPemerintahanFisipUnhas

5. Bapak Prof. Dr. JuandaNawawi, M.Si. selakupembimbing I yang telahdengansungguh-sungguh, tulus, dansepenuhhatimembimbingdanmengarahkandalampenyusunanskripsiini.

6. Bapak Dr. SuhardimanSyamsu, M.Siselakupembimbing II Dan PembimbingAkedemiksaya ,yang jugatelahbersediameluangkanwaktunyakepadapenulisuntukmembimbingdanmengarahk andenganbaikdalampenyelesaianskripsiini.

7. Kedua orang tuapenulisAyahanda Abdul JalilHamid danIbundaRostinMakassau yang selalumemberikansemangat ,dukungan, perhatian, sertadoanyakepadapenulisselamamenempuhstudi. Kalian adalahpenyemangatdisetiaplangkah yang akupijakkandalammengarungikehidupan SalamsayangDarikuuntuk kalian.

8. Untuksaudaraku MELISA SE,M.Siterimakasihasdukungandanmotivasikepadapenulis..

10. Buatterman-temanAngkatan 2015 Prodi IlmuPemerintahandanTemanTeman yang adadi UniversitasHasanuddin,Maaftidaksempatsayasebutkannamanyasatupersatuterimakasih atasbantuannyaselamaini.



Optimization Software:
www.balesio.com

ku yang selalumemberimotivasi (NoerDeaAyuliaBaso) perhatiannyaselamainikepadapenulis.

12. Terima Kasih Kepada Pak Kuliah Palsu
(Tino, Ahmad, Anto, Wowo, Aco, Fatwa, Indah, Tahir, Feri, Sigit S.IP, Idam, Hasbi,)

Terima Kasih Atas cerita Indah kalian selam ini Kalian adalah yang terbaik di antarsemua yang terbaik.

13. Terimakasih kepada Andi Muh Fahri Faizal S.IP dan Nadira Regita S.IP atas Bantuannya selama ini Kalian adalah Cerminan Mahasiswa yang Membuat Banyak Hal Positif Di Ilmu Pemerintahan 2015.

14. Terima kasih kepada Kepala BKKBN Kota Makassar, Kepala UPT BKKN Biringkanya, Kepala UPT BKKBN Ujung Tanah, Kepala BKKBN Panakukang beserta seluruh staf pegawai Kecamatan serta narasumber lainnya, atas kesediaan waktunya memberikan informasi kepada penulis untuk kepentingan penelitian skripsi ini. Serta pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan semua yang sudah membantu dan memberikan kontribusi kepada penulis selama penyusunan skripsi.

15. Terimakasih kepada Seluruh staf dan Dosen pengajar yang telah susah payah memberikan Ilmu dan waktunya kepada saya selama beberapa tahun ini kalian adalah para pahlawan yang sebenarnya, Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, dan dukungan, penulis doakan semoga Allah SWT membalasny dengan pahala yang setimpal serta senantiasanya melimpahkan rahmatNya kepada kita semua. Amin

. Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 21 Januari 2019



AKBAR SUMITRO

ABSTRAK

AKBAR SUMITRO (E121
155047) **Analisis Implementasi Kebijakan Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Di BKKBN Kota Makassar**, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanuddin. Pembimbing I Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si., dan Pembimbing II Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan Kebijakan Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Di BKKBN Kota Makassar. Bidang komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi melihat Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain Dan sangat relevan jika di gunakan untuk melihat permasalahan yang terjadi. Tahapan ini menjadi tolak ukur dari penyelenggaraan Bimbingan dan Pembinaan Ketahanan di Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan institusional, pendekatan behavioral, dan pendekatan fungsional dalam menganalisis kebijakan, program, teknik analisis kualitatif yakin bahwa jika suatu masalah satu akan berbeda dengan masalah lainnya.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa, Implementasi Program BKKBN Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Kumpang, Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, kurangnya kuantitas sumber daya manusia, disposisi yang belum optimal, Sumber Daya Manusia BKKBN bekerja sesuai dengan struktur yang ada. (2) Faktor pendukung yaitu Meningkatnya Penghasilan Masyarakat Dalam Program UPPKS dalam pelaksanaan program terkait ketahanan dan kesejahteraan keluarga ialah peningkatan penghasilan masyarakat, dan merupakan tanggung jawab berbagai pihak. (3) faktor penghambatnya ialah belum terdapatnya perda kota Makassar terkait Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dan kurangnya sumber daya manusia Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPDKB) Kota Makassar

komunikasi, Sumber daya, Struktur Organisasi, Disposisi, Faktor Implementasi



Optimization Software:
www.balesio.com

ABSTRACT

Akbar Sumitro (E121 15 507). **Implementation Analysis of Policies for Family Resilience and Welfare Development in the Makassar City of BKKBN.** Governmental Studies Program, Faculty of Social and Political Science, Hasanuddin University. Under the supervision of Prof.Dr. JuandaNawawi, M.Si., and Dr.SuhardimanSyamsu, M.Si.

This research purposed to describe and visualize the implementation of Family Endurance and Welfare in the Makassar City. It uses certain variables, Communication, Disposition,Resouces, and bureaucrary Structure. These variables related to each other and Used as executed tools to analyze research.

This research used descriptvite qualitative method in analyzing program and policy occurred. Data obtained by direct ,interview,literature study, and Observation located in samples.

Based on the research, the conclusion of The Analysis of The Role of Family Endurance and Welfare in Makassar City shows that; 1) The implementation of BKKBN programs in Biringkanaya District, Panakkukang District, Ujung Tanah Disctrict are still unoptimal, there are lacking of communication, lack of human resources quantitiy, uneven disposition, eventhough the institution works with appropriate structure. 2) the supporting factors of Family Endurance and Welfare program is the increase of citizens' income, and this program is supported by a lot of stakeholders. 3)While the resistor factors are the unavailability of Makassar City regional regulation, and the lacking of human reasources of Population Control and Planned Family Agency of Makassar City.

Key Worldrs: *Communication ,Disposition ,Resouces, and bureaucrary Structure, Implementation*



DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Lembar Penerimaan.....	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak.....	vii
Abstrac.....	viii
Daftar Isi.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Konsep Kebijakan.....	6
2.2 Implementasi Kebijakan	9
2.3 Model Implementasi Kebijakan.....	13
2.4 Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.....	18
2.5 Kerangka Pikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Lokasi Penelitian	28
3.2 Pendekatan Penelitian.....	28
3.3 Tipe Penelitian	28
3.4 Teknik Pengumpulan Data	29
3.5 Teknik Analisis Data	31
3.6 Lokasi dan Sumber Data	31
3.7 Jenis Penelitian	32
3.8 Teknik Analisis Data	33
3.9 Kesimpulan dan Pembahasan.....	34



4.1. GambaranUmum	35
4.1.1 Sejarah Kota Makassar.....	35
4.1.2 KeadaanGeografis Kota Makassar	38
4.1.3 KondisiDemografis Kota makassar	40
4.1.4 VisidanMisi Kota Makassar.....	45
4.1.4.1 Visi Kota Makassar	45
4.1.4.2 Misi Kota Makassar	48
4.2 GambaranUmum BKKBN Kota Makassar	49
4.2.1 VisidanMisi BKKBN Kota Makassar.....	59
4.3 ImplementasiKebijakanKetahanan Dan Kesejahteraan.....	60
4.3.1 Komunikasi	61
4.3.2 Disposisi	71
4.3.3 Sumberdaya	84
4.3.4 StukturBirokrasi	89
4.4 Faktor Yang Mempengaruhimplementasi	91
4.4.1 FaktorPenghambatImplementasi.....	91
4.4.2FaktorPendukungImplementasi	99
BAB V Penutup	105
5.1 Kesimpulan.....	105
5.2 Saran.....	106
DaftarPustaka	100
Lampiran-Lampiran	



DAFTAR TABEL

TABEL 1. Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Kelamin Di Kota Makassar	41
TABEL 2. Luas Wilayah Dan Presentasi Kecamatan Di kota Makassar	43
TABEL 3. Penduduk Dari Kecamatan Di Kota Makassar	44



DAFTAR GAMBAR

Gambar .PetaAdministrasi Kota Makassar	45
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

1. SuratIzinPenelitian
2. Dokumentassi
3. PeraturanPerundang-Undangan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan pengamatan penulis dan di dukung oleh berbagai informasi penerapan kebijakan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang ada di BKKBN dihadapkan beberapa fenomena yang dapat diidentifikasi. Di Indonesia pembangunan keluarga diamanatkan dalam Undang-Undang No. 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Ketahanan keluarga menjadi satu sub-bab pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib untuk menyelenggarakannya.

Peraturan Walikota Makassar No. 95 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Pasal 17 Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang

nyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga



dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi: perencanaan kegiatan operasional di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Pelaksanaan kegiatan di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga, pengoordinasian kegiatan di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya. Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai uraian tugas: merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyusun kebijakan teknis di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, melaksanakan Norma Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam pelaksanaan pembangunan keluarga. Kementerian/Lembaga, pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota menyusun dan mengembangkan kebijakan

naan dan kebijakan teknis yang berpedoman pada konsep ketahanan
sejahteraan yang didalamnya mencakup landasan legalitas dan



keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi dan ketahanan sosial budaya.

Dalam Konsep Kesejahteraan keluarga Keluarga merupakan unit masyarakat terkecil yang memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam pengembangan kualitas SDM yang mencakup pengembangan kemampuannya. Kemampuan menghadapi tantangan dan mencegah resiko terhadap masalah di sekeliling mereka. Kemampuan SDM tersebut juga bisa menjadi modal dalam upaya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sekaligus upaya pencapaian kesetaraan gender. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang di bentuk berdasarkan perkawinan yang sah, maupun memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materi yang layak, bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antar anggota juga antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya.

Aspek Ekonomi. Pendidikan yang minim mengakibatkan sulitnya memperoleh penghasilan yang layak, Keluarga menjadi beban perekonomian yang cukup berat sehingga memicu perceraian karena tidak memenuhi kebutuh primer dalam keluarga, Masalah perekonomian keluarga adalah salah satu sumber disorganisasi dalam keluarga. umumnya masalah keluarga mulai dari hal hal kecil sampai akhirnya berimbas pada perceraian.



Aspek Kesehatan ,dimana dari sudut pandang kedokteran pernikahan mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang

dilahirkan. anak perempuan yang berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar selama kehamilan berbeda pada anak yang melahirkan 15-19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar resiko dari masa kehamilan sampai melahirkan. Kesehatan reproduksi juga menjadi alasan kenapa usia pernikahan dibawa umur tidak di anjurkan karna hal itu akan menimbulkan salah satu penyebab kanker leher rahim

Fenomena pelaksanaan kebijakan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kota Makassar dapat di identifikasi yaitu antara lain:

1) di Kel Laikang Kec Bringkanaya ,di Kac ujung tanah,di kec Panakukang makassar terjadi permasalahan mengakibatkan belum Optimalnya Bina keluarga remaja yang didalamnya terdapat Pusat Informasi dan Konseling remaja (PIK R) yang menjadi faktor utama di bidang ketahan Keluarga di Kota makassar 2) Persoalan Kependudukan di Kel Laikang Kec Bringkanaya ,Kec ujung tanah ,Kec panakukang makassar seperti Urusan Keluarga Berencana ,dan juga Suasana Lorong (KB) yang menjadi faktor Ketahanan Pendorong kesejahteraan Masyarakat



1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi penerapan Kebijakan pembinaan Ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kota Makassar berdampak pada ketahanan dan kesejahteraan di Kota Makassar?
2. Faktor-faktor apa yang Mempengaruhi implementasi pelaksanaan program kebijakan pembinaan Ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kota Makassar?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan Implementasi kebijakan tingkat Ketahanan dan kesejahteraan di kota makassar.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor Mempengaruhi pelaksanaan program kebijakan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar

Manfaat penelitian

Dapat dijadikan bahan ajar atau dikembangkan sebagai penelitian selanjutnya agar kesejahteraan bisa merata keseluruh kalangan masyarakat Indonesia dan Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kosep Kebijakan

Sering diperdebatkan apa perbedaan antara kebijakan dengan kebijaksanaan. Ini terjadi, karena dua kata ini, kebijakan dan kebijaksanaan, sama-sama belum dibakukan ke dalam bahasa Indonesia. Dalam pengertian kedua kata ini masih belum disepakati penggunaannya. Formalisasi dari sebuah kebijaksanaan, mengingat seringnya kata kebijakan digunakan pada lingkungan-lingkungan formal (organisasi atau pemerintahan).

Selanjutnya dijelaskan bahwa kebijakan diartikan sebagai (1) Kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan; (2) Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan. Istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan. Kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Kebijakan (*policy*) dibagi menjadi dua:

substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan



bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan. Ini berarti, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah¹.

kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (repetiveness) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Sekalipun definisi menimbulkan beberapa pertanyaan atau masalah untuk menilai beberapa pertanyaan atau masalah untuk menilai berapa lama sebuah keputusan dapat bertahan atau hal apakah yang membentuk konsistensi dan pengulangan tingkah laku yang dimaksud serta siapa yang sebenarnya melakukan jumlah pembuat kebijakan dan pematu kebijakan tersebut, namun demikian definisi ini telah memperkenalkan beberapa komponen kebijakan publik.

Kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Untuk itu definisikan kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta jadi penganjur, inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

ada empat ciri pokok masalah kebijakan, yaitu sebagai berikut: (1)

bergantungan, kebijakan bukan merupakan suatu kesatuan yang



hab, Solichin, 1997, Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan
nerbit P.T. Bumi Aksara, Jakarta

berdiri sendiri, melainkan bagian dari seluruh sistem masalah. (2) Subyektifitas, kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan didefinisikan, diklarifikasikan, dijelaskan dan dievaluasi secara selektif. (3) Sifat bantuan, masalah-masalah kebijakan dipahami, dipertahankan, dan diubah secara sosial. (4) Dinamika masalah kebijakan, cara pandang orang terhadap masalah pada akhirnya akan menentukan solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah tersebut. Empat hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan mengandung berbagai pertimbangan, terlebih jika menyangkut masyarakat banyak. Artinya dapat berhubungan dengan prinsip kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, dan prinsip demokrasi.²

kebijakan adalah merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan (1) apa yang dilakukan, (2) apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhinya, (3) apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut.

Pendapat lain dikemukakan oleh Irfan Islami dalam Edy Sutrisno bahwa kebijakan mempunyai beberapa implikasi, yaitu: (1) Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan dari Pemerintah. (2) Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata. (3) Bahwa kebijakan publik itu, baik untuk melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud



n, 2014, Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Penerbit Bandung. Hal 21

dan tujuan tertentu. (4) Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.³

Pengertian kebijakan dapat dibedakan dalam tiga tingkatan: (1) Kebijakan Umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan⁴ wilayah atau instansi yang bersangkutan. (2) Kebijakan pelaksanaan, adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang. (3) Kebijakan teknis, adalah kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan

2.2 Implementasi kebijakan

implementasi merupakan tahapan yang menghubungkan antara rencana dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, implementasi merupakan proses penerjemahan pernyataan kebijakan Pemahaman seperti ini berangkat dari pembagian proses kebijakan publik ke dalam beberapa tahap di mana implementasi berada di tengah-tengahnya. Implementasi juga dapat diartikan sebagai proses yang terjadi setelah sebuah produk hukum dikeluarkan yang memberikan otorisasi terhadap suatu kebijakan, program atau output tertentu. Implementasi merujuk pada serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah yang mengikuti arahan tertentu tentang tujuan



dy (2009), Mengenal Perencanaan, Implementasi & Evaluasi Kebijakan/Program, Penerbit, s, Surabaya. Hal 15-16
bedy, 2015, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Penerbit Alfabeta, Bandung. Hal

dan hasil yang diharapkan. Implementasi meliputi tindakan-tindakan (dan non-tindakan) oleh berbagai aktor, terutama birokrasi, yang sengaja didesain untuk menghasilkan efek tertentu demi tercapainya suatu tujuan.

Jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat di wilayah lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor;

Sejauh mana perubahan yang diinginkan dan sebuah kebijakan. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin; apakah letak sebuah program sudah tepat⁵

Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci; dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup: seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur

,AG.analisis kebijakan publik.Yogyakarta:daftar pustaka Pelajar 2005 Hal 90-93



cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.

Jadi tahapan implementasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah suatu perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas dan dapat diukur. Dengan demikian tugas implementasi kebijakan sebagai suatu penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil melalui aktivitas atau kegiatan dan program pemerintah.

Hal-hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan ke dalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus. Implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya.

Analisis masalah Implementasi Kebijakan dengan mendasarkan konsep kegiatan-kegiatan fungsional. beberapa dimensi dan



implementasi pemerintahan mengenai program-program yang sudah disahkan, kemudian menentukan implementasi, juga membahas aktor-aktor yang terlibat, dengan memfokuskan pada birokrasi yang merupakan lembaga eksekutor. Jadi Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat di lakukan. Dengan demikian implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program kedalam tujuan kebijakan yang diinginkan.

Tiga kegiatan utama yang paling penting dalam implementasi keputusan adalah: (1) Penafsiran yaitu merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan. (2) Organisasi yaitu merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan kebijakan. (3) Penerapan yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah dan lain-lainnya.

Keberhasilan implementasi kebijakan program ditinjau dari tiga faktor yaitu: (1) Prespektif kepatuhan (compliance) yang mengukur implementasi dari kepatuhan atas mereka. (2) Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan. (3) Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok a manfaat yang diharapkan.



Faktor Kegagalan Implementasi Kebijakan disebabkan beberapa faktor: (1) Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada obyek kebijakan maupun kepada para pelaksana dan isi kebijakan yang akan dilaksanakannya dan basil-basil dalam kebijakan itu. (2) Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan kebijakan atau ketidak tepatan atau ketidak tegasan intern ataupun ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti atau adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu dukungan. (3) Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.

Hal ini terkait dengan pembagian potensi diantaranya para aktor implementasi dan juga mengenai organisasi pelaksana dalam kaitannya dengan diferensiasi tugas dan wewenang. Prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan- tujuan tersebut.

2.3 Model model Implementasi

1. Model Soren C. Winter

ntasi kebijakan dipengaruhi oleh formulasi kebijakan, proses
ntasi kebijakan, dan dampak/hasil implementasi kebijakan itu sendiri.



3 (tiga) variabel yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi yakni

1. Perilaku hubungan antar organisasi. Dimensinya adalah : komitmen dan koordinasi antar organisasi;

2. Perilaku implementor (aparatur birokrat) tingkat bawah. Dimensinya adalah kontrol politik, kontrol organisasi dan etos kerja dan norma-norma profesional

3. Perilaku kelompok sasaran. Kelompok sasaran tidak hanya memberi pengaruh pada dampak kebijakan tetapi juga mempengaruhi kinerja aparat tingkat bawah, jika dampak yang ditimbulkan baik maka kinerja aparat tingkat bawah juga baik demikian dengan sebaliknya. Perilaku kelompok sasaran meliputi respon positif atau negatif masyarakat dalam mendukung atau tidak mendukung suatu kebijakan yang disertai adanya umpan balik berupa tanggapan kelompok sasaran terhadap kebijakan yang dibuat.

2. Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Model ini bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :

1) Standar dan sasaran kebijakan



Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di antara para agen implementasi.

2) Sumber daya

Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.

3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.

4) Karakteristik agen pelaksana

Sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

5) Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi dan politik yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.



6) Disposisi implementor

Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yaitu :

- a. respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan;
- b. kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan;
- c. Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

3. Model George C. Edward III

implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

(1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh

kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok



(2) Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

(3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

(4) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya

prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP).

SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur

organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan



dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.⁶

Implementasi yang digunakan penulis

Dengan penulis memaparkan beberapa contoh model implementasi penulis memutuskan model Model George C. Edward III sebagai acuan untuk melihat dan menerapkan implementasi kebijakan ketahan dan kesejahteraan, ini di liat dari berbagai aspek yaitu di bidang komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi melihat Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain Dan sangat relevan jika di gunakan untuk melihat permasalahan yang terjadi.

2.4 Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga

Arah pembangunan Keluarga Sejahtera Dalam kurun waktu 2004-2009 tertera dalam peraturan Presiden RI Nomor 7 tahun 2005 tentang RPJM 2004-2009. Dalam PP tersebut dinyatakan bahwa pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas merupakan langkah penting⁷ dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, yang dilakukan melalui pengendalian kualitas penduduk dan peningkatan kualitas insani dan sumber daya manusia.



_____, AG. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005 hal 35-37

Usaha ekonomi produktif keluarga, Pemerintah senantiasa memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang kurang beruntung. Banyak program pembangunan diarahkan untuk membantu masyarakat miskin, meskipun kita tidak menutup mata bahwa hasilnya belum memuaskan semua pihak.

Kita masih menyaksikan adanya program pembangunan yang belum tepat sasaran, masih adanya kebocoran di sana sini dan sebagainya, dalam kaitan inilah pemerintah memberikan kompensasi dan subsidi untuk membantu masyarakat miskin melalui program pangan, kesehatan, sosial, pendidikan umum dan agama, transportasi, sarana air bersih, usaha kecil, pemberdayaan masyarakat pesisir, penanggulangan dan pengadaan alat kontrasepsi⁸.

Keluarga sejahtera merupakan output ketahanan keluarga dimana terdapat dinamika proses pengelolaan sumberdaya serta masalah-masalah dalam keluarga. Pengertian ketahanan keluarga menurut UU No. 10 tahun 1992 (pasal 1 ayat 15) yaitu:

kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-material dan psikis, mental, spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan

nyanya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir

n.

arga sejahtera dan kesehatan reproduksi cetakan pertama 2008 hal 79-80



Peningkatan ketahanan menjadi penting sehubungan dengan fakta adanya variasi kemampuan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan, pelaksanaan fungsi, melalui pengelolaan sumberdaya yang dimiliki.

Menurut Andarus Darahim dalam bukunya Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga Hal. 128 menjelaskan mengenai pengertian keluarga yang harmonis adalah keluarga yang hidup dengan penuh suasana saling pengertian dan toleransi satu sama lain terhadap kelebihan dan kekurangan dari pasangannya, karena tidak ada manusia yang sempurna.

Pasangan hidup sebagai pilihannya sendiri atau dipikirkan orang tua yang wajib diajak untuk saling pengertian satu sama lain dalam menghadapi persoalan dan kebutuhan hidup bersama, yang tentunya diperlukan semangat kerjasama dan toleransi yang dibangun dengan berlandaskan tujuan untuk membangun kebersamaan dalam suasana saling mengisi terhadap kekurangan pasangannya.

Menurut Hasbiyallah dalam bukunya Keluarga Sakinah menjelaskan mengenai menjaga keharmonisan dengan memahami hak dan kewajiban suami istri diantaranya:

1. Hak bersama suami istri

Hak suami menjadi kewajiban seorang istri

Hak istri menjadi kewajiban suami



Dalam bukunya Andarus Darahim yang berjudul Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga juga dijelaskan mengenai menjaga⁹ Perkembangan Kedudukan Dan Pembangunan keluarga menjadi salah satu isu pembangunan nasional dengan penekanan pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga. Secara yuridis, Undang-Undang No. 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera menyebutkan bahwa “ketahanan keluarga berfungsi sebagai alat untuk mengukur seberapa jauh keluarga telah melaksanakan peranan, fungsi, tugas-tugas dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggotanya.”Sementara itu,¹⁰ peran penting keluarga tertera pada peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Peraturan Pemerintah ini sangat jelas menyebutkan bahwa keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan nasional.Undang-Undang No. 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga menyatakan bahwa upaya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga perlu dipertimbangkan untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas.



Andarus Darahim, M.P.A, Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga, (Surabaya: IPGH Publishing, 2015), hlm. 128
PERKEMBANGAN KENDUDUKAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA Oleh: Herien Puspitawati Departemen Ilmu Keluarga dan Konseling Fakultas Ekologi Manusia- Institut Pertanian Bogor 2013
Makna dan arti indikator kesejahteraan yang berkelanjutan halaman 5-10 dan 11-14

Serta mendefinisikan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Kebijakan Pembangunan Keluarga bisa bersifat ekspisit atau bersifat implisit. Dengan pembagian tersebut maka pada dasarnya hampir seluruh kebijakan pembangunan sosial dan ekonomi adalah juga kebijakan keluarga karena akan berdampak terhadap keluarga. Namun terdapat perbedaan dampak yang diakibatkan sebuah kebijakan pemerintah terhadap keluarga, apakah secara langsung atau secara tidak langsung mempengaruhi struktur dan fungsi keluarga, walau pada akhirnya sama-sama mempengaruhi kesejahteraan keluarga.

Ketahanan Keluarga (*family strength or family resilience*) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk partisipasi di masyarakat, dan integrasi social.

pandangan lain mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai suatu dinamik keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan fisik, materil dan mental untuk hidup secara mandiri (peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994). Ketahanan keluarga



juga mengandung maksud sebagai kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis, sejahtera dan bahagia lahir dan batin.

Dalam pandangan yang lain, ketahanan keluarga mencakup kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah untuk mencapai kesejahteraan (Sunarti,2001), kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang senantiasa berubah secara dinamis serta memiliki sikap positif terhadap berbagai tantangan kehidupan keluarga

Kesejahteraan berdasarkan kriteria biro pusat statistic (BPS) 2017.

- 1) Dari sisi makanan, BPS menggunakan indikator yang direkomendasikan oleh Widya Karya Pangan dan Gizi tahun 2016 yaitu 2.100 kalori per orang per hari.
- 2) Sedangkan dari sisi kebutuhan non makanan tidak hanya terbatas pada sandang dan papan melainkan pendidikan dan kesehatan
- 3) BPS selama ini melaporkan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 2014
- 4) Pada saat itu, penghitungan jumlah persentase penduduk miskin mencakup periode 2009- 2014 dengan menggunakan modul konsumsi susenas (survei sosial ekonomi nasional).



Kesejahteraan keluarga berdasarkan 14 kriteria kemiskinan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)

- 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m kuadrat per orang
- 2) Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
- 3) Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa di plester
- 4) Tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
- 6) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan
- 7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah
- 8) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu
- 9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
- 10) Hanya sanggup makan satu/dua kali dalam sehari
- 11) Tidak sanggup membayar perawatan puskesmas/poloklinik
- 2) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0,5 ha,buruh tani,nelayan,buruh



bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan upah dibawah Rp 600.000 per bulan

- 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD
- 14) Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000 seperti: sepeda motor (kredit/non kredit),

Kesejahteraan Keluarga Berdasarkan Kriteria Badan kordinasi keluarga berencana nasional:

- 1) Kebutuhan dasar (basic needs) yang terdiri dari variabel pangan, sandang, papan dan kesehatan
- 2) Kebutuhan sosial psikologis (social psychological needs) yang terdiri dari variabel pendidikan, rekreasi, transportasi, interaksi sosial internal dan eksternal
- 3) Kebutuhan pengembangan (Developmental needs) yang terdiri dari variabel tabungan, pendidikan khusus, akses terhadap informasi.

Kesejahteraan keluarga menurut BKKBN (2017)

- 1) Keluarga pra sejahtera (pra-KS) Sering dikelompokkan sebagai “sangat miskin” adalah keluarga yang belum adalah keluarga yang belum memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi:

- Makan dua kali sehari atau lebih sehari
- Memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas (misalnya dirumah, kerja/sekolah dan bepergian)



- Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah¹¹
- 2) Indikator non-ekonomi
- Melaksanakan ibadah
 - Bila anak sakit dibawa kesarana kesehatan

Kesejahteraan keluarga berdasarkan united nation development(UNDP) Pada Konvrensi Dunia Untuk Pembangunan Sosial (WORLD SUMMIT FOR SOCIAL DEVELOPMEN) Di Kopenhagen 2010 kemiskinan didefinisikan sebagai berikut.

Kemiskinan memiliki wujud yang majemuk, termasukrendahnya ting¹²kat pendapatan dan sumberdaya produktif yang menjamin kehidupan berkesinambungan, kelaparan dan kekurangan gizi, rendahnya tingkat kesehatan, keterbatasan dan kurang akses pada pendidikan dan layanan-layanan pokok lainnya.

kondisi tak wajar dan akibat penyakit yang terus meningkat,kehidupan bergelandang dan tempat tinggal yang tidak memadai,lingkungan yang tidak aman,serta diskriminasi dan keterasingan sosial dan dicirikan juga oleh rendahnya tingkat partisipasi.

¹¹<http://format-lengkap-administrasi-desa.blogspot.co.id/2017/08/20-indikator-kesejahteraan-ml>
www.bkkbn.go.id/ Tanggal 14 mei jam 13:24
 0, Profil Kemiskinan di Indonesia
 0, Berita Resmi Statistik,
 /07/Th. XIII, 1 Juli
 ta.

